

BAB II

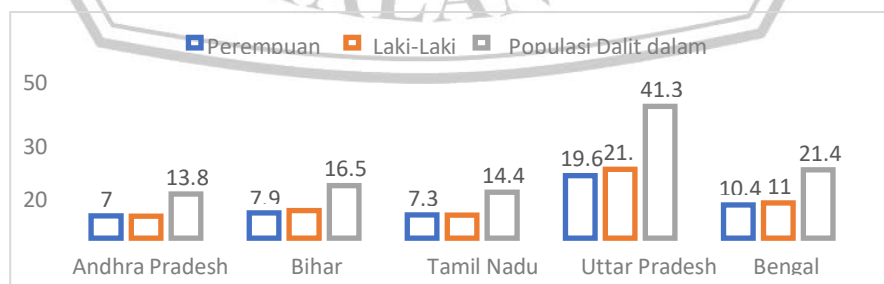
**KONDISI PEREMPUAN DALIT DI INDIA PADA MASA
PEMERINTAHAN KEDUA NARENDRA MODI DAN PROFIL
*INTERNATIONAL DALIT SOLIDARITY NETWORK (IDSN)***

Pada bab ini menjelaskan kondisi perempuan Dalit di India terkait hak sosial- ekonomi, dalam pendidikan, dan keterlibatan dalam politik khususnya di masa pemerintahan kedua Narendra Modi dan profil dari *International Dalit Solidarity Network (IDSN)*.

2.1 Permasalahan Perempuan Dalit di India Pada Masa Pemerintahan Kedua Narendra Modi

Populasi Dalit di India termasuk yang terbanyak dari negara-negara Asia Selatan lainnya. Data sensus penduduk India tahun 2011 menunjukkan populasi Dalit di India sekitar 203 juta penduduk, 97 juta diantaranya adalah para perempuan Dalit. Terdapat beberapa wilayah di India dengan populasi Dalit yang cukup banyak.

Grafik 2.1 Wilayah di India dengan Populasi Dalit Terbanyak



Sumber: Census of India, 2011

Dari tabel sensus penduduk India di atas menunjukkan terdapat lima wilayah di India dengan populasi Dalit terbanyak, urutan pertama adalah wilayah Uttar Pradesh sebagai salah-satu wilayah terbesar di India yang terdapat 41.3juta penduduk Dalit.⁴⁰ Kemudian urutan kedua di wilayah Bengal Barat dengan total populasi orang-orang Dalit sebanyak 21.4 juta, wilayah Bihar yang terdapat 16.5 juta Dalit serta sekitar 14 juta orang-orang Dalit di Tamil Nadu dan 13.8 juta di wilayah Andhra Pradesh. Pada dua wilayah terakhir ini, jumlah populasi laki-laki dan perempuan Dalit tidak berbeda jauh, justru populasi perempuan Dalit lebih tinggi sedikit dibandingkan jumlah laki-lakinya.

Banyaknya populasi Dalit di India terlebih para perempuannya menjadikan isu-isu mengenai para perempuan Dalit di India tidak dapat dianggap remeh karena mereka masih menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang Dalit berada di luar dari sistem kasta (*Varna*) yang diterapkan dalam struktur masyarakat India untuk membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas soisal. Hal ini tidak hanya menjadikan kaum Dalit berada pada posisi terbawah tetapi juga membuat para perempuannya tidak hanya mengalami diskriminasi kasta tetapi juga secara gender dalam kehidupan sosial India yang masih tinggi budaya patriarki membuat mereka memiliki posisi terendah di antara perempuan non-Dalit bahkan dengan laki-laki Dalit itu sendiri dan semakin memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat.⁴¹ Terlebih India yang berada di bawah pemerintahan kedua Narendra

⁴⁰ Office of the Registrar General and Census Commissioner India, "State/District Wise Scheduled Caste Population," Office of the Registrar General and Census Commissioner India, 2011, <https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>. (03/03/2024, 10:25 WIB)

⁴¹ Manish Surendrarao Gomase, "Positioning Dalit Women in Indian Society," *Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)* 7, no. 7 (2020): 23–27. Hal. 23

Modi saat ini bersama partainya yaitu BJP (*Bharatiya Janta Party*) mengukung *Hindutva* atau nilai-nilai ajaran Hindu sebagai ideologi politik sejak di era pemerintahan pertamanya yang memungkinkan adanya dominasi kasta atas khususnya dari kalangan laki-lakinya, meskipun Modi dan koalisi partainya sejak memerintah telah memfokuskan pada perempuan dan menganggap telah memberdayakan perempuan India selama satu dekade memimpin.⁴²

Hal ini tercantum dalam resolusi BJP pada tahun 2014 yang berkomitmen dalam memberikan prioritas pada pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan melalui beberapa skema yang dikeluarkan sejak pemerintahan pertama Modi yaitu *Beti Bachao Beti Padhao*, “selamatkan dan edukasi para anak perempuan” yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup, perlindungan, dan kesetaraan pendidikan anak perempuan.⁴³ Kemudian *Women Healthcare* yang bertujuan pemberian nutrisi ibu hamil khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok terpinggirkan seperti Dalit, melakukan pelatihan dan keterampilan dalam teknologi untuk perempuan, dan program literasi khusus untuk perempuan dewasa dengan fokus pada kaum terpinggirkan termasuk perempuan Dalit.⁴⁴ Setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri India untuk yang kedua kalinya, Modi bersama BJP memfokuskan kembali pada Pembangunan yang Dipimpin oleh Perempuan yang tercantum dalam tujuan-tujuan BJP pada tahun 2019. Dalam mencapai tujuan tersebut inisiasi Modi

⁴² Maya John, “Indian Women Have Gone Backward Under Narendra Modi’s Rule,” Jacobin, 2024, <https://jacobin.com/2024/05/india-women-modi-bjp-inequality>, (14/07/2024, 16:22 WIB)

⁴³ Prime Minister of India, “Beti Bachao, Beti Padhao: Caring for the Girl Child,” India Governance, 2015, https://www.pmindia.gov.in/en/government_tr_rec/beti-bachao-beti-padhao-caring-for-the-girl-child/ (04/02/2024, 14:19 WIB)

⁴⁴ Bharatiya Janata Party, “Election Manifesto 2014 Ek Bharat Shreshtha Bharat,” 2014, http://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf, Hal. 21-22

diantaranya memastikan pemberdayaan secara finansial dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih untuk perempuan, memprioritaskan keamanan perempuan, memastikan layanan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh seluruh perempuan India, memasukkan kursus kepekaan gender dalam kurikulum pendidikan, dan berkomitmen memberlakukan kuota reservasi sebanyak sepertiga untuk perempuan dalam parlemen.⁴⁵

Meskipun perempuan Dalit di India juga dimasukkan dalam beberapa inisiasi Perdana Menteri Modi, tetapi Sejak orang-orang Dalit lahir dan bertumbuh mereka sudah mengalami perlakuan tidak setara oleh kasta atas. Anak-anak Dalit tidak diperbolehkan untuk duduk di bangku depan saat bersekolah, tidak diperbolehkan makan bersama atau bermain bersama dengan anak-anak kasta atas.⁴⁶ Ujaran kebencian juga terjadi terhadap kaum Dalit di dunia maya yang seharusnya menjadi tempat yang dapat membawa hal positif sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat mereka, justru dapat menjadi negatif khususnya para perempuan Dalit yang sering menjadi korban pelecehan di dunia maya sehingga tidak sedikit dari mereka yang berhenti menggunakan media sosial karena rasa takut mendapat perlakuan tersebut.

Secara keseluruhan memang perempuan di India kerap menjadi korban kejahatan termasuk perempuan Dalit. Berdasarkan data dari *National Crimes Records Bureau* (NCRB) hampir setiap tahunnya tingkat kejahatan terhadap

⁴⁵ Bharatiya Janata Party, "Sankalp Bharat Sashakt Bharat," *Bharatiya Janata Party*, 2019, https://www.bjp.org/en/manifesto2019?_cf_chl_jschl_tk__=pmd_c732594dde30d5d430b8c10756cf543a55263170-1629118242-0-gqNtZGzNAiKjcnBszQhO.

⁴⁶ United Nations Human Rights, "The Dalit: Born into a Life of Discrimination and Stigma," United Nations Human Rights, 2021, <https://www.ohchr.org/en/stories/2021/04/dalit-born-life-discrimination-and-stigma>. (03/03/2024, 13:11 WIB)

perempuan India meningkat. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah mengenai keamanan, keselamatan dan pemberdayaan perempuan dengan mengeluarkan beberapa program seperti *women helpline*, *One Stop Centre*, dan *Mahila Police Volunteer* pada tahun 2021 untuk membantu perempuan India dalam mempromosikan dan memfasilitasi penyelesaian kasus kejahatan dan keadilan gender di masyarakat dan juga di dalam keluarga.⁴⁷ Kendalanya adalah dalam pengalokasian dana untuk program-program tersebut masih tidak optimal.⁴⁸ Selain itu, dalam kurun waktu 2019 – 2022 lebih banyak terjadi peningkatan kasus kejahatan terhadap perempuan dibandingkan dengan tingkat penurunannya.

Peningkatan kekerasan yang dialami oleh perempuan India secara keseluruhan tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat di India yang mendorong terjadinya kekerasan kepada perempuan India secara terus menerus.⁴⁹ Hanya sedikit perempuan India yang melaporkan kekerasan yang mereka alami ke lembaga resmi.⁵⁰ Sebagian besar dari perempuan India merasa terancam jika melaporkan kekerasan yang dialami atau demi menjaga kehormatan keluarga.

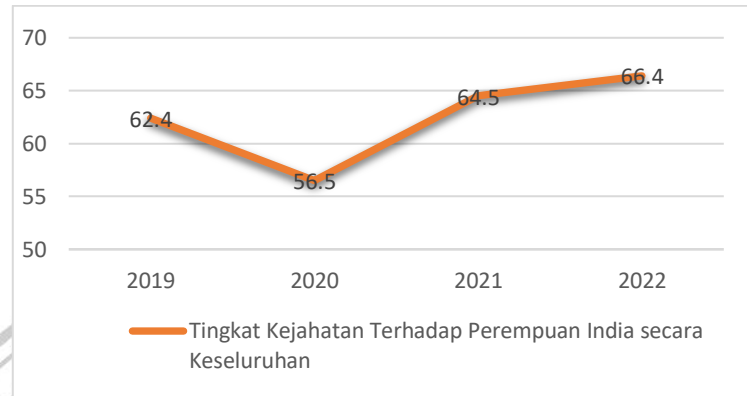
⁴⁷ Ministry of Women and Child Development, “Mission Shakti Guidelines” (New Delhi, 2022). Hal. 9

⁴⁸ Mampi Bose, “What Government Expenditure Tells Us About Official Attitudes Towards Women’s Safety,” *The Wire*, 2023, <https://thewire.in/women/what-government-expenditure-tells-us-about-official-attitudes-towards-womens-safety>. (06/03/2024, 17:31 WIB)

⁴⁹ Sangeeta Yadav, “What Is Causing Rise in Violence Against Women in India?,” *Sputnik India*, 2023, <https://sputniknews.in/20231125/what-is-causing-rise-in-violence-against-women-in-india-5561538.html>. (02/04/2024, 22:08 WIB)

⁵⁰ Yuvaraj Krishnamoorthy, Karthika Ganesh, and Karthiga Vijayakumar, “Physical, Emotional and Sexual Violence Faced by Spouses in India: Evidence on Determinants and Help-Seeking Behaviour from a Nationally Representative Survey,” *Journal of Epidemiology and Community Health* 74, no. 9 (2020): 732–740, <https://doi.org/10.1136/jech-2019-213266>. Hal. 738

Grafik 2.2 Tingkat Kejahatan Terhadap Perempuan India Tahun 2019-2022



Sumber: National Crime Records Bureau

Berdasarkan data dari NCRB grafik di atas menunjukkan pada tahun 2019 total kasus kejahatan yang terdaftar terhadap perempuan India mencapai 405.861 kasus dengan tingkat kejahatan 62.4, kejahatan ini didominasi oleh kekerasan yang dilakukan suami atau kerabat terdekat, penghinaan dan penyerangan terhadap perempuan atas apa yang digunakannya, penculikan dengan ancaman atau kekerasan, dan pemerkosaan. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penurunan kasus kejahatan terhadap perempuan India dengan tingkat kejahatan 56.5 dan total kasus sebanyak 371.503 kasus. Penurunan tingkat kejahatan pada kurun tahun tersebut disebabkan karena adanya pandemi yang membuat pemerintah India melakukan pembatasan sosial dan hal ini berdampak pada pengurangan tingkat kejahatan terhadap perempuan.⁵¹

Setelah masa pandemi dan pembatasan sosial mulai berakhir, tingkat kejahatan perempuan di India mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021

⁵¹ Ruben Poblete Cazenave, "The Impact of Lockdowns on Crime and Violence Against Women – Evidence From India," *Social Science Research Network*, 2020. Hal. 16

terdapat 428.278 kasus dengan tingkat kejahatan 64.5. Kemudian data terbaru NCRB tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kejahatan terhadap perempuan India dari tahun sebelumnya yaitu pada tingkat 66.4 dengan total 445.256 kasus kejahatan. Setiap tahunnya pola kejahatan yang dialami oleh perempuan India secara keseluruhan didominasi oleh kejahatan rumah tangga yang dilakukan oleh suami hingga orang-orang terdekat, pelecehan seksual baik secara verbal maupun fisik, dan penculikan serta pemaksaan dengan kekerasan.⁵²

Begitu pun dengan perempuan Dalit di India khususnya di masa pemerintahan kedua Narendra Modi mereka tidak terlepas menjadi korban dari intimidasi dan kejahatan seksual oleh laki-laki kasta atas dengan kasus yang terus meningkat. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 tercatat dalam data NCRB jumlah korban kejahatan terhadap perempuan Dalit terus meningkat setiap tahunnya. Hampir semua jenis kejahatan yang dialami oleh perempuan Dalit di India tidak jauh dari mendapatkan kekerasan seksual. Hal ini berkaitan dengan status sosial mereka yang rendah di masyarakat dan hanya sedikit dari perempuan Dalit memiliki lahan pekerjaan sendiri membuat mereka bekerja dengan orang kasta atas yang juga melakukan aniaya hingga eksploitasi secara fisik, psikologis hingga ekonomi.⁵³

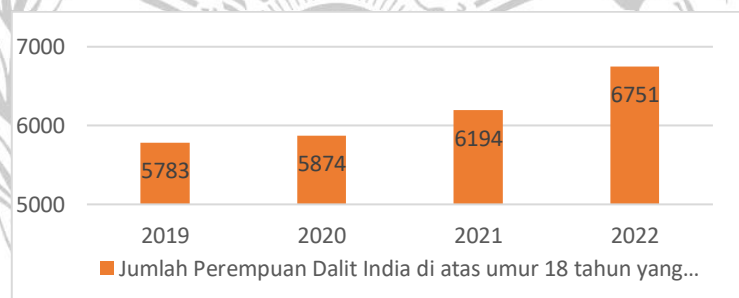
Peningkatan kejahatan terhadap perempuan Dalit di India salah-satunya adalah adanya seperti budaya kebebasan hukum (*culture of impunity*) bagi pelaku yang rata-rata dilakukan oleh laki-laki kasta atas. Hal ini karena sudah seperti

⁵² National Crime Records Bureau, "Crime in India 2022 Volume I" (New Delhi, 2022). Hal. 20

⁵³ Gomase, "Positioning Dalit Women in Indian Society." Hal. 26

budaya bagi yang memiliki lahan atau tanah memiliki hak sepenuhnya atas lahan dan para pekerja di dalamnya sehingga membuat laki-laki kasta atas ini mudah dalam mengeksploitasi para perempuan Dalit yang bekerja di lahan mereka.⁵⁴ Adanya dominasi dari kasta atas khususnya laki-lakinya mudah bagi mereka dalam melakukan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan Dalit yang berada di bawahnya dan sistem hukum yang juga didominasi oleh kasta atas membuat kasus kejahatan yang dialami perempuan Dalit banyak tidak ditindaklanjuti lebih oleh pihak berwenang.⁵⁵

Grafik 2.3 Jumlah Korban Kejahatan Terhadap Perempuan Dalit di India



Sumber: National Crime Records Bureau

Dalam grafik di atas menunjukkan jumlah perempuan Dalit India di atas umur 18 tahun yang menjadi korban kejahatan sebanyak 5.783 orang pada kasus-kasus yang terdaftar pada tahun 2019. Kejahatan-kejahatan yang terdaftar tersebut antara lain penghinaan hingga penyerangan atas apa yang mereka pakai, pemaksaan dengan kekerasan, penguntit (*stalking*), penculikan dan pemaksaan terhadap

⁵⁴ Tanika Godbole, "Why India's Dalit Women Are Vulnerable to Sexual Violence," Deutsche Welle, 2020, <https://www.dw.com/en/why-indias-dalit-women-are-vulnerable-to-sexual-violence/a-55423556>. (03/04/2024, 05:50 WIB)

⁵⁵ Gomase, *Op. Cit.* Hal. 26

perempuan Dalit untuk menikah, dan kekerasan seksual. Tahun 2020 jumlah perempuan Dalit sebagai korban kejahatan meningkat menjadi 5.874 orang. Meskipun data keseluruhan tingkat kejahatan terhadap perempuan India cukup menurun selama pandemi tetapi perempuan Dalit tetap menjadi sasaran kekerasan oleh kasta atas, para perempuan Dalit tetap harus bekerja disaat adanya pembatasan sosial dan mereka bekerja di bawah tekanan oleh kasta dominan.⁵⁶

Kemudian pada tahun 2021 menjadi 6.194 perempuan Dalit yang menjadi korban atas perlakuan tersebut. Data terbaru NCRB 2022 menunjukkan jumlah perempuan Dalit meningkat secara signifikan dengan korban sebanyak 6.751 orang.⁵⁷ Jenis kejahatan yang biasanya dialami oleh perempuan Dalit berupa perlakuan penghinaan dan pelecehan seksual, dua tindakan ini cukup tinggi menjadikan perempuan Dalit sebagai korban atas kejahatan tersebut. Banyak dari kasus kejahatan yang dialami perempuan Dalit diselesaikan secara kompromi, hanya sedikit yang dilaporkan ke pihak berwenang karena masih kurangnya dukungan untuk membantu keadilan bagi perempuan.⁵⁸

Oleh karena itu, dari tahun ke tahun masalah-masalah yang dihadapi perempuan Dalit di India belum teratasi sepenuhnya meskipun dari Pemerintah India terutama di masa pemerintahan kedua Narendra Modi yang mengeluarkan

⁵⁶ Smita M. Patil, "Gender Equity and COVID-19: Dalit Standpoints," *Economic and Political Weekly*, 2021, <https://www.epw.in/engage/article/gender-equity-and-covid-19-dalit-standpoints#:~:text=Caste and gender against the,changing nature of the caste.> (06/02/2024, 17:16 WIB)

⁵⁷ National Crime Records Bureau, "Crime in India 2022 Volume II" (New Delhi, 2022), <https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701608364CrimeinIndia2022Book2.pdf>. Hal. 541

⁵⁸ Anuradha Nagaraj, "India's Low-Caste Women Raped to Keep Them 'in Their Place,'" Thomson Reuters Foundation, 2020, <https://news.trust.org/item/20201125013415-sqvxe/> (06/02/2024, 16:22 WIB)

beberapa inisiasi untuk melindungi para perempuan India. Selain itu, status mereka sebagai perempuan dan orang Dalit membuat mereka rentan menjadi korban perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang menghambat terpenuhinya hak-hak mereka. Berikut kondisi hak sosial-ekonomi, kondisi hak pendidikan, dan kondisi hak politik perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan kedua Narendra Modi:

2.1.1 Kondisi atas Hak Sosial-Ekonomi

Perempuan Dalit di India menjadi kelompok yang terbelakang akibat struktur sosial di India membuat mereka mengalami perlakuan tidak setara karena mereka merupakan orang Dalit dan juga perempuan. Kesenjangan ini dihasilkan oleh norma, kebijakan, dan praktik sosial yang mendukung ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya sosial terhadap perempuan Dalit.⁵⁹ Status sosial yang dimiliki oleh perempuan Dalit sama sekali tidak menguntungkan dan berdampak buruk pada segala sektor kehidupan mereka. Hak sosial-ekonomi perempuan Dalit sangat di bawah dari kata kesejahteraan, di daerah pedesaan mereka berada di pinggir atau terpisah di salah-satu sudut desa tanpa fasilitas umum seperti air minum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses jalan raya. Pada daerah perkotaan sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah yang kumuh dan tidak bersih.

Hak sosial-ekonomi perempuan Dalit yang seharusnya dapat hidup dengan layak dan berpartisipasi dalam masyarakat justru sebaliknya karena status sosial

⁵⁹ Dr. Rubeena, "Socio-Economic and Educational Status of Dalit Woman in Contemporary India," in *Education and Women Empowerment: Opportunities and Challenges in India*, 1st ed. (Prudvi Publications, 2022), 103–113. Hal. 104

mereka yang terpinggirkan menyebabkan terbatasnya mereka dalam mengakses pekerjaan yang layak, layanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya, jaminan sosial, pendidikan dan partisipasi dalam politik. Karena itu juga kondisi perekonomian perempuan Dalit di India sangat memprihatinkan, orang-orang Dalit masih banyak yang berada dalam kemiskinan sehingga mengharuskan para perempuannya juga turut terlibat untuk bekerja dengan lahan pekerjaan yang terbatas.⁶⁰ Perempuan Dalit di India sering mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dengan minimnya jaminan perlindungan, sangat jarang para perempuan Dalit di India yang memiliki tanah sendiri menyebabkan tingginya keterlibatan pekerjaan mereka di sektor yang tidak terorganisir. Bahkan jika dibandingkan dengan perempuan non-Dalit, tingkat pengangguran perempuan Dalit lebih tinggi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.⁶¹ Kesempatan mereka dalam berwirausaha juga terbatas terutama para perempuan migran Dalit karena kurangnya modal serta pinjaman.

Padahal Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidato Konferensi Tingkat Menteri tentang Pemberdayaan Perempuan bagian dari G20 India, mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan. Hal ini menjadi prioritas Modi saat ini untuk membuat wadah yang setara bagi semua perempuan termasuk akses pasar hingga tingkat global melalui bantuan pinjaman *Pradhan Mantri Mudra Yojana* untuk mendukung unit tingkat mikro, sekitar 70% pinjaman

⁶⁰ *Ibid.*, Hal. 105

⁶¹ *Ibid.*, Hal. 106

tersebut diberikan kepada para perempuan India⁶² Realitanya, India masih menjadi negara dengan tingkat partisipasi pekerja perempuan yang rendah, data dari *The World Bank* tahun 2023 menunjukkan hanya 33% partisipasi angkatan kerja perempuan India secara keseluruhan yang berumur diatas 15 tahun.⁶³

Oleh karena itu, Perempuan Dalit di India harus berjuang lebih lagi dalam memperjuangkan perekonomian mereka dibandingkan para perempuan non-Dalit lainnya, meskipun Modi mengatakan bahwa kaum yang terpinggirkan seperti orang-orang Dalit menjadi penerima manfaat terbesar dari program kesejahteraan oleh pemerintah pusat.⁶⁴ Adapun beberapa skema yang dikeluarkan Pemerintah India dalam memberdayakan Dalit termasuk para perempuannya antara lain *National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)* perusahaan non-profit yang bertujuan untuk memberikan bantuan pinjaman, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, dan memberikan dukungan pemasaran melalui Badan Penyalur Negara, Bank Sektor Publik, dan lembaga lainnya.⁶⁵ Kemudian program *Venture Capital Fund for Scheduled Caste* yaitu upaya pemerintah untuk mempromosikan ide-ide dan inisiatif kewirausahaan

⁶² Press Trust India, "PM Modi Says Women's Economic Empowerment Fuels Growth, Need to Create Environment Where Female Achievers Become Norm," Deccan Herald, 2023, <https://www.deccanherald.com/india/pm-modi-says-womens-economic-empowerment-fuels-growth-need-to-create-environment-where-female-achievers-become-norm-1243148.html> (07/02/2024, 19:23 WIB)

⁶³ The World Bank, "Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15+) (Modeled ILO Estimate) - India," The World Bank, 2023, <https://genderdata.worldbank.org/countries/india/#:~:text=In India%2C the labor force,older that is economically active.> (07/02/2024, 19:40 WIB)

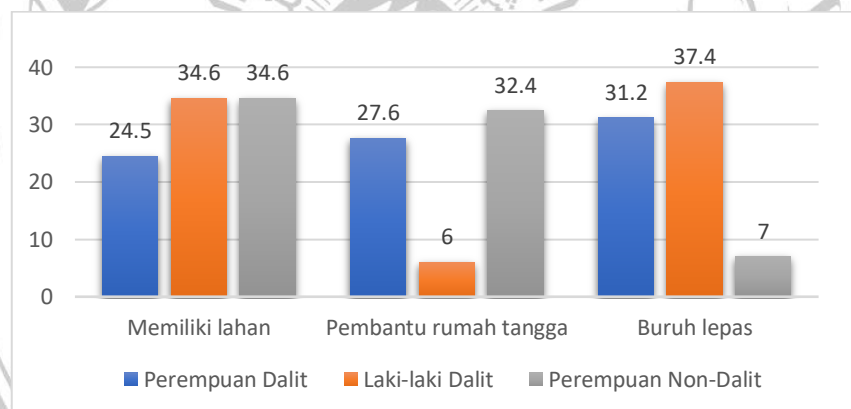
⁶⁴ All India Radio News, "PM Modi Says, Dalits, Deprived, Tribals and Poor Are Biggest Beneficiaries of Central Government's Welfare Schemes," News on AIR Governance, 2024, <https://newsonair.gov.in/News?title=PM-Modi-says%2C-Dalits%2C-Deprived%2C-Tribals-and-Poor-are-biggest-beneficiaries-of-Central-government's-welfare-schemes&id=470897>. (07/02/2024, 23:00 WIB).

⁶⁵ Ministry of Social Justice and Empowerment, "National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)," 2023.

orang-orang Dalit dengan menyediakan pembiayaan konsesional melalui pengelolaan yang diberikan kepada sektor swasta.⁶⁶

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah India memang membawa hal yang positif tetapi tingkat partisipasi kerja perempuan Dalit India masih terbilang rendah dari perempuan non-Dalit dan laki-laki Dalit. Data PLFS 2023 menunjukkan persentase pekerja perempuan Dalit di daerah pedesaan banyak bekerja sebagai buruh lepas dan di perkotaan banyak dari mereka sebagai karyawan.⁶⁷ Perempuan Dalit yang dipekerjakan sebagai buruh tani dan pekerjaan sanitasi sipil dengan minim perlindungan kerja.⁶⁸

Grafik 2.4 Persentase Pekerja 2022-2023



Sumber: *Periodic Labour Force Survey 2022-2023*

Persentase keterlibatan pekerja perempuan Dalit berada di bawah tingkat persentase dari laki-laki Dalit dan perempuan kasta atas. Secara keseluruhan perempuan Dalit banyak bekerja menjadi buruh lepas dengan persentase 31.2%,

⁶⁶ Ministry of Social Justice and Empowerment, "Operational Guidelines for Financial Assistance to Scheduled Caste Entrepreneurs," 2021. Hal 3

⁶⁷ National Sample Survey Office, "Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2022-23," *Implementation, Ministry of Statistics and Programme*, 2023, www.mospi.gov. Hal. 175.

⁶⁸ Rubeena, *Op. Cit.*, Hal 105

kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan persentase mereka memiliki lahan sendiri untuk bekerja juga rendah hanya 24.5% jika dibandingkan dengan laki-laki Dalit dan perempuan non-Dalit yang sama-sama memiliki persentase sebanyak 34.6%. Pada wilayah pedesaan, banyak dari perempuan Dalit yang bekerja sebagai pekerja lepas terutama di sektor agrikultur dengan tingkat persentase sebanyak 34.5%, kemudian di urutan kedua mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan persentase sebanyak 31%, dan 25.3% untuk kepemilikan lahan.

Selanjutnya di perkotaan partisipasi perempuan Dalit dalam bekerja lebih rendah hal ini karena orang-orang Dalit yang berpindah ke kota juga tidak mudah dapat diterima dalam dunia kerja di perkotaan, meskipun juga ada perempuan Dalit yang mencari peluang pekerjaan di kota. Data PLFS juga menunjukkan Tingkat gaji di kota memang lebih tinggi sebanyak 55.7% jika dibandingkan dengan upah di pedesaan hanya 34.5%, tetapi dalam memiliki lahan sendiri persentase mereka rendah yaitu hanya 20.3%, bekerja sebagai pembantu rumah tangga hanya 9.8% dan sebagai pekerja lepas sebanyak 14.1%. Tingginya biaya tempat tinggal di perkotaan mempersulit imigran Dalit dalam memilih tempat tinggal yang layak dan fasilitas sanitasi buruk serta tidak bersih.⁶⁹ Meskipun di kota, seorang Dalit tetaplah Dalit yang didiskriminasi oleh kasta di atasnya, termasuk dalam akses fasilitas kesehatan, sulitnya perekonomian mereka semakin memperparah dalam mengakses hal tersebut. Keadaan semakin buruk saat mereka juga kurang pengetahuan akan

⁶⁹ O. J. Nimble and A. V. Chinnasamy, "Financial Distress and Healthcare: A Study of Migrant Dalit Women Domestic Helpers in Bangalore, India," *Journal of International Women's Studies* 21, no. 5 (2020): 32–45. Hal. 39

program asuransi jaminan sosial pemerintah serta persyaratan dokumen yang biasanya kurang.

Walaupun Pemerintah India telah berupaya dalam mengembangkan kebijakan dan rencana program untuk mendorong partisipasi perempuan secara keseluruhan dalam bekerja tetapi masih kuatnya budaya patriarki, kurangnya kesadaran dan aksesibilitas terhadap program-program kebijakan menjadi hambatan mengapa upaya memberdayakan perempuan India menjadi tidak efektif.⁷⁰ Termasuk skema-skema untuk mensejahterakan perempuan Dalit yang dalam penerapannya belum maksimal karena mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi-informasi tersebut serta penerima manfaat program yang belum menyeluruh.

2.1.2 Kondisi atas Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen penting untuk mendorong pemberdayaan dan perkembangan perempuan Dalit.⁷¹ Akan tetapi, masih banyaknya perempuan Dalit di India yang berada di bawah garis kemiskinan menghambat mereka untuk memperoleh akses pendidikan. Hal ini karena perempuan Dalit rentan terpinggirkan termasuk dalam hal mendaftar sekolah dan mobilitas pendidikan mereka juga terbatas karena tingginya biaya.⁷² Para pelajar yang kurang beruntung seperti perempuan Dalit tidak didukung baik secara sosial maupun budaya kasta ini

⁷⁰ Ayesha Siddiq, "Advancing Women's Role in India's Economic Progress," Observer Research Foundation, 2023, <https://www.orfonline.org/expert-speak/advancing-women-s-role-in-india-s-economic-progress>. (07/02/2024,22:31 WIB)

⁷¹ Rubeena, *Op. Cit.*, Hal.106

⁷² S Mastkar and K Sharma, "Higher Education of Dalit Women and Degree Completion in India," *GD Goenka University Journal of Perspectives in Social Science and Humanities Research* 1, no. 1 (2022): 11–23. Hal. 16.

menjadi tantangan yang cukup besar agar mereka dapat masuk ke Lembaga Pendidikan Tinggi yang baik dan berkualitas.

Mengenai pendidikan, terdapat sebuah kebijakan yang sudah ada sejak India masih di bawah kepemimpinan Inggris yang mulai memperkenalkan sistem Reservasi untuk kelompok terpinggirkan. Kemudian setelah Merdeka Pemerintah India mengadopsi kebijakan tersebut untuk memberikan keterwakilan kelompok-kelompok marginal seperti *Scheduled Caste* (SC) atau orang-orang Dalit, *Scheduled Tribes* (ST) orang-orang suku pedalaman terpinggirkan, dan *Other Backward Classes* (OBC) melalui kuota yang diberikan untuk merekrut secara langsung pada pekerjaan sipil di seluruh negara bagian India melalui seleksi terbuka.⁷³ Kuota ini juga berlaku dalam pendidikan maupun dalam politik, kuota yang diberikan kepada orang-orang Dalit adalah sebanyak 15% termasuk dalam hal pendidikan di tingkat sekolah dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta kuota untuk pengajar.⁷⁴

Akan tetapi dalam penerapannya kuota yang disediakan dengan diterimanya orang-orang dari kelompok terpinggirkan ini tidak relevan. Seperti Data kolaborasi *Delhi University* dengan organisasi yang memperjuangkan Reservasi menunjukkan jumlah pengajar di universitas tersebut sebanyak 10 ribu pengajar dan seharusnya 1500 diantaranya adalah untuk pengajar Dalit.⁷⁵ Realitanya hanya 650 pengajar Dalit yang bekerja di Institusi tersebut. Kasta atas tetap mendominasi di berbagai sektor termasuk pendidikan yang semakin dikuasi oleh mereka dan biaya

⁷³ Ministry Of Personnel Public Grievances and Pensions, "Brochure of Reservation," 2014. Hal. 11

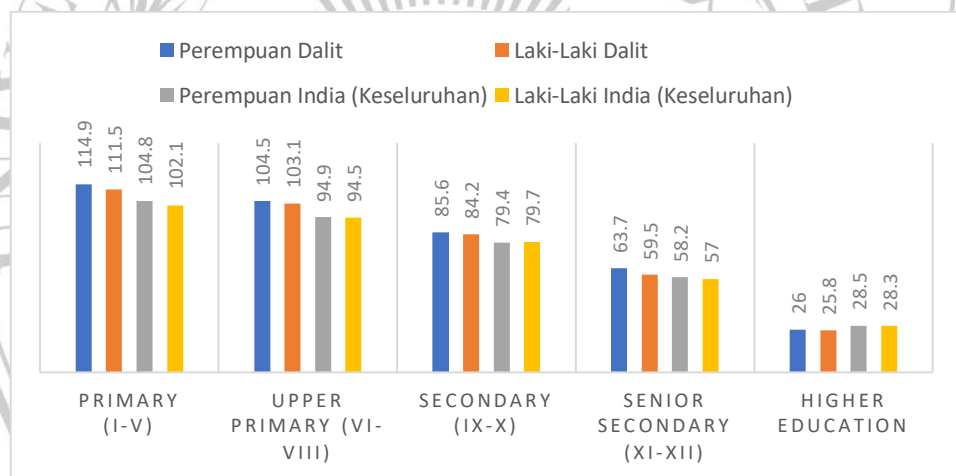
⁷⁴ *Ibid.*, Hal. 11-12

⁷⁵ International Dalit Solidarity Network, "The Status of Reservation in Education (Collaboration of Progress Organisations Struggling for Reservation, Delhi University)," 2012.

pendidikan yang mahal. Hal ini membuat kaum Dalit dan kelompok terpinggirkan lainnya terus berjuang dalam kemiskinan.

Meskipun kaum Dalit India masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya terutama para perempuannya termasuk dalam hak mengakses pendidikan tetapi berdasarkan data dari *Report on Unified District Information System for Education Plus (UDISE+)* dan *All India Survey on Higher Education (AISHE) 2021-2022* pendidikan untuk SC secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, kedua sumber menunjukkan partisipasi pendidikan perempuan Dalit cukup berada di atas dari laki-laki Dalit.

Grafik 2.5 Persentase *Gross Enrollment Ratio* (GER) Tahun 2021-2022



Sumber: *Report on Unified District Information System for Education Plus (UDISE+)* dan *All India Survey on Higher Education 2021-2022*

Persentase GER atau partisipasi angka kasar merupakan persentase partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia sekolah, grafik persentase India di atas menunjukkan persentase partisipasi perempuan secara keseluruhan pada beberapa jenjang pendidikan tertentu sedikit lebih tinggi dari laki-laknya. Begitupun persentase partisipasi perempuan Dalit

India di semua jenjang umur dalam jenjang pendidikan tertentu sedikit di atas laki-laki Dalit. Memang secara keseluruhan partisipasi sekolah di India pada semua kategori mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikannya terutama dalam jenjang kelas 11-12 (*senior secondary*) pada tahun 2020-2021 persentase sebanyak 53.8% dan naik menjadi 57.6% pada tahun berikutnya.⁷⁶ Hal ini tentu merupakan sebuah hal yang positif di bidang pendidikan karena semakin tingginya partisipasi perempuan India dalam pendidikan dan tidak ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara partisipasi pendidikan perempuan dengan laki-laki.

Meskipun pada jenjang pendidikan lebih tinggi (*higher education*) partisipasinya tidak sebanyak jenjang pendidikan di bawahnya tetapi partisipasi pendidikan perempuan Dalit mengalami peningkatan sebanyak 2.1% pada tahun sebelumnya bahkan sedikit diatas laki-laki Dalit.⁷⁷ Secara keseluruhan memang partisipasi pelajar dalam jenjang perguruan tinggi tidak sebanyak tingkat *primary* dan *secondary* hal ini karena dari banyaknya universitas yang tersebar di India baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian kualitasnya masih kurang. Kualitas yang masih kurang ini didorong oleh pendanaan yang tidak maksimal untuk tingkat nasional dan tingkat negara bagian dan regulasi yang tidak efektif dari universitas maupun badan pemerintahan yang mengelola.⁷⁸ Selain itu, juga terdapat kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan lahan pekerjaan karena

⁷⁶ Ministry of Education Department of School Education and Literacy, "Report on Unified District Information System For Education Plus (UDISE+)" (New Delhi, 2022), <https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/home>. Hal. 24

⁷⁷ Ministry of Education Departement of Higher Education, "All India Survey on Higher Education 2021-22" (New Delhi, 2022), www.aishe.gov.in. Hal. 260

⁷⁸ David Tobenkin, "India's Higher Education Landscape," NAFSA: Association of International Educators, 2022, <https://www.nafsa.org/ie-magazine/2022/4/12/indias-higher-education-landscape>. (27/04/2024, 11:26 WIB)

banyak perusahaan yang meragukan keterampilan lulusan pendidikan ini dan pemerintah juga dianggap terlalu berfokus pada jenjang sekolah dasar hingga menengah atas saja.⁷⁹

Partisipasi orang-orang Dalit India dalam perguruan tinggi juga masih sedikit karena stigma buruk yang mereka miliki dan perlakuan yang tidak adil masih sering mereka dapatkan sehingga juga membatasi mereka dalam mengakses pendidikan. Para perempuan Dalit juga menghadapi beberapa tantangan agar mereka dapat bersekolah hingga ke perguruan tinggi selain karena orang-orang Dalit masih banyak berada dalam kemiskinan para perempuannya juga banyak yang tidak memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memutuskan tidak sekolah karena permintaan orang tua untuk bekerja ataupun disuruh untuk menikah.⁸⁰ Akan tetapi kenaikan persentase partisipasi pendidikan di India secara keseluruhan tentu tidak terlepas karena adanya upaya yang dilakukan Pemerintah India melalui program-program yang dikeluarkan termasuk beberapa skema untuk orang Dalit selain kebijakan reservasi.

Program beasiswa pendidikan *National Overseas Scholarship* (NOS) untuk para pelajar yang terbelakang secara finansial seperti orang-orang Dalit untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi termasuk untuk belajar di luar negeri.⁸¹ Kemudian program *Pre-Matric Scholarship for Scheduled Caste* yang sudah berjalan sejak tahun 2012 hingga sekarang, bertujuan untuk mendukung

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Mastkar and Sharma, *Op. Cit.*, Hal. 19

⁸¹ Departement of Social Justice and Empowerment, "National Overseas Scholarship," Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India, 2023, <https://socialjustice.gov.in/schemes/28>. (23/2/2024, 16:48 WIB)

siswa Dalit dan para orang tua mereka melalui bantuan keuangan untuk mengakses pendidikan mereka hingga ke tahap pra-Matritik atau menengah atas.⁸² Pada tahapan selanjutnya juga terdapat program *Post-Matric Scholarship for Scheduled Caste* yang sejak tahun 2007 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa sekolah menengah Dalit ke jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana melalui bantuan keuangan.⁸³

Beberapa program yang diupayakan pemerintah India memang membawa hal yang positif dalam memajukan partisipasi pendidikan orang-orang Dalit khususnya untuk perempuan Dalit yang meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya masih banyak para perempuan Dalit yang belum merasakan manfaat dari program tersebut dengan kuota yang juga terbatas. Hal ini karena masih banyak perempuan Dalit yang sulit dalam mengakses informasi mengenai skema-skema yang dikeluarkan pemerintah, rendahnya pemanfaatan alokasi dana, serta masih kurangnya koordinasi antar para pemangku kebijakan menyebabkan para perempuan Dalit di India kurang pengetahuan dan kesadaran mengenai program pemerintah sehingga kurang memanfaatkan hal tersebut.⁸⁴

⁸² Ministry of Social Justice and Empowerment, "Guidelines Pre-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste and Others," 2022. Hal 2

⁸³ Ministry of Social Justice and Empowerment, "Post-Matric Scholarship for SC Students," Government of India, 2021, <https://socialjustice.gov.in/schemes/25>. (09/03/2024, 22:50 WIB)

⁸⁴ Ashok Kumar Sonkar, "Evaluation of Government Policies and Programmes for the Welfare of Dalits: A Review," *International Journal of Creative Research Thoughts* 9, no. 9 (2021): 725–40, www.ijcrt.org. Hal. 10

2.1.3 Kondisi atas Hak Politik

Secara general partisipasi perempuan India dalam politik memang meningkat setiap pemilihan umum sebagai pemilih, sebagai kandidat, dan representasi di parlemen. Data Komisi Pemilihan India menunjukkan terdapat peningkatan persentase suara pemilih pada pemilu India tahun 2019 dari pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2014 awalnya 65.6% naik menjadi 66.9% bahkan lebih tinggi dari suara pemilih laki-laki.⁸⁵ Kemudian partisipasi perempuan India dalam parlemen juga meningkat, pada *Lok Sabha* (Dewan Perwakilan Rakyat) dari pemilu sebelumnya hanya 668 kandidat perempuan naik menjadi 716 kandidat. Meskipun terdapat peningkatan perempuan India di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat tetapi persentase representative perempuan India masih di bawah dari 15%. Kemudian pada pemilihan *Rajya Sabha* (Dewan Negara Bagian) yang dilakukan setiap dua tahun sekali perempuan India yang terpilih mengalami sedikit penurunan, sebelumnya sebanyak 28 perempuan India menjadi 25 perempuan saja yang terpilih. Representasi perempuan India jika dibandingkan dengan laki-laki masih tergolong rendah.

Partisipasi politik perempuan di India lebih banyak pada *Panchayat* yaitu Dewan di tingkat pemerintahan lokal di desa atau distrik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Konstitusi Amandemen ke-73 India tahun 1992 mengenai kuota sepertiga dari jumlah total anggota *Panchayat Raj Institution* (PRIs) adalah perempuan termasuk di dalamnya adalah perempuan Dalit dan kelompok

⁸⁵ Ambar Kumar Ghosh, "Women's Representation in India's Parliament: Measuring Progress, Analysing Obstacles," *Observer Research Foundation*, 2022, <https://www.orfonline.org/research/womens-representation-in-indias-parliament/>. Hal 9.

termarjinalkan lainnya.⁸⁶ Kemudian Rancangan Undang-Undang Reservasi Perempuan (*Women's Reservation Bill*) di parlemen 1996, namun pengesahan ini dalam perjalanannya mendapat penolakan dan beberapa kali gagal berlaku hingga pada tahun 2023 Badan Legislatif India mengesahkan RUU tersebut untuk seluruh dewan perwakilan rakyat dan negara bagian termasuk tingkat lokal agar menyisihkan 33% kursi parlemen untuk kandidat perempuan.⁸⁷

Tentu harusnya beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah India menjadi hal positif bagi para perempuan di sana terutama perempuan Dalit karena akan memberikan peluang untuk terlibat lebih dalam politik meskipun perempuan Dalit paling tidak berpotensi dapat terlibat dalam Dewan Desa. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan perempuan Dalit juga dapat menjadi bagian dari Dewan Rakyat maupun Dewan Negara Bagian meskipun tidak sebanyak peluang pada tingkat lokal. Seperti seorang perempuan Dalit dari Haryana yaitu Selja Kumar yang merupakan bagian anggota *Rajya Sabha* (Dewan Negara Bagian) selama dua periode hingga tahun 2020. Selja berasal dari Partai Politik Nasional India atau *Indian National Congress* (INC) dan sebelumnya ia juga pernah diangkat menjadi Menteri Keadilan dan Pemberdayaan Sosial. Selama tergabung dalam parlemen Selja berupaya untuk memajukan hak-hak perempuan dan hak-hak untuk kelompok terpinggirkan di India.⁸⁸

⁸⁶ Ministry of Law Justice and Company Affairs, "73rd Constitutional Amendment Act 1992" (New Delhi, 1992), Hal. 1

⁸⁷ UN Women, "India Passes Law to Reserve Seats for Women Legislators," UN Women, 2023, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/10/india-passes-law-to-reserve-seats-for-women-legislators>. (14/03/2024, 06:08 WIB)

⁸⁸ EPIC India, "Selja Kumari," EPIC India, 2022, <https://epic.uchicago.in/people/selja-kumari/>.

Adanya pengesahan RUU mengenai Reservasi Perempuan menurut Saskia dalam tulisannya bukanlah sebuah kebetulan menjelang pemilu India 2024, PM Narendra Modi dan partai BJP yang hingga saat ini sudah berkuasa selama dua periode memiliki kepentingan untuk menarik perhatian para pendukung perempuan.⁸⁹ Selama beberapa tahun memimpin Modi berfokus pada isu pemberdayaan perempuan untuk memperkuat kekuasaannya dan menampilkan citra diri pelindung yang maskulin. Dominasi BJP di parlemen sebagai partai nasionalis Hindu juga dapat mengancam hak-hak kelompok minoritas.⁹⁰

Selain itu, terpilihnya para perempuan Dalit yang menjadi bagian dari Dewan Desa atau *Panchayat* masih mendapatkan perlakuan tidak adil karena mereka adalah perempuan dan dari Dalit sehingga hal ini juga mempengaruhi kurang terlibatnya suara-suara mereka dalam proses pemutusan kebijakan.⁹¹ Seharusnya perempuan Dalit dapat berperan di beberapa pertemuan dan diskusi umum tetapi banyak dari mereka yang tidak diundang ke pertemuan dan lebih seringnya dialihkan ke rekan laki-laki mereka. Tingkat literasi yang rendah juga menyebabkan perempuan Dalit ragu dan takut untuk berpendapat lebih dalam forum termasuk intimidasi dan tekanan oleh laki-laki kasta atas yang menolak adanya partisipasi mereka.⁹² Seperti salah-satu perempuan Dalit, Periyasamy yang terpilih sebagai *Panchayats* di desa di Tamil Nadu, dia mendapatkan perlakuan

⁸⁹ Saskia Brechenmacher, "India's New Gender Quota Law Is a Win for Women—Mostly," Carnegie Endowment for International Peace, 2023, <https://carnegieendowment.org/2023/09/26/india-s-new-gender-quota-law-is-win-for-women-mostly-pub-90644>. (14/03/2024, 06:16 WIB)

⁹⁰ Brechenmacher, *Ibid.*

⁹¹ L Thirupathi, "The SC- ST Women's Political Representation in PRIS Issues and Challenges," *International Journal of Creative Research Thoughts* 9, no. 5 (2021): 332–338. Hal. 335

⁹² Thirupathi, *Ibid.*, Hal. 337

diskriminasi seperti tidak disapa, diabaikan bahkan diberikan kursi yang tidak layak di kantornya.⁹³

Perempuan kasta atas masih bisa mengakses aktivitas politik karena bukan dari kelompok yang terpinggirkan, berbeda dengan partisipasi perempuan Dalit dalam kegiatan politik terbilang rendah bahkan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Selain karena latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan mereka juga terbelakang hal ini yang menyebabkan masih kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka dalam politik.⁹⁴ Berdasarkan survey oleh Kaur dan Singh mengenai pendidikan sebagai sebuah kunci emansipasi kepada 50 orang perempuan anggota *Panchayats* pada beberapa desa di Punjab menunjukkan sebanyak 64% beranggapan keterbelakangan yang dialami perempuan Dalit karena rendahnya pendidikan. Kurangnya pengetahuan politik membuat perempuan Dalit tidak menyadari hak mereka dan kurangnya rasa percaya diri. Hasil survey juga menunjukkan bahwa rata-rata perempuan yang terpilih di parlemen seperti *Panchayat* adalah mereka yang memiliki wawasan cukup untuk berpolitik dan mandiri secara finansial tidak bergantung pada suami atau kerabat.⁹⁵ Sangat berbeda dengan masih banyaknya perempuan Dalit yang tidak tereduksi dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Oleh karena itu, adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah India terhadap kuota untuk perempuan Dalit merupakan sebuah

⁹³ Anuradha Nagaraj, "Denied a Chair, Dalit Women Confront Discrimination on Indian Village Councils," Reuters, 2021, <https://www.reuters.com/article/idUSKBN2991QJ/>. (23/2/2024, 23:50 WIB)

⁹⁴ Kaur and Singh, "Political Awareness among Dalit Women and Their Participation in Rural Local Bodies in Punjab : Special Reference to Bathinda." Hal. 9

⁹⁵ Kaur and Singh, *Op. Cit.* Hal. 7

hal positif untuk memajukan keterlibatan perempuan Dalit bahkan untuk perempuan India secara keseluruhan dalam parlemen. Selain itu, terlibatnya perempuan Dalit di tingkat pemerintahan lokal atau *Panchayat* juga merupakan sebuah progres bagi mereka agar dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan meskipun hanya pada tingkat desa atau distrik. Akan tetapi karena mereka tetaplah merupakan orang Dalit sehingga tidak jarang juga tetap mendapatkan tindakan diskriminasi oleh anggota lainnya yang berasal dari kasta atas biasanya adalah para laki-laki kasta atas. Para perempuan Dalit yang terpilih menjadi bagian dari Dewan merupakan sebuah kemajuan karena latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan yang dimiliki perempuan Dalit masih rendah membuat banyak dari mereka tidak sadar akan hak-hak politik mereka.

2.2 Profil *International Dalit Solidarity Network* (IDSN)

2.2.1 Latar Belakang dan Visi-Misi IDSN

International Dalit Solidarity Network (IDSN) didirikan pada tahun 2000 oleh sekelompok individu dan organisasi antara lain *National Campaign on Dalit Human Rights* (NCDHR), merupakan organisasi pembela Dalit yang memfokuskan pada advokasi untuk orang-orang Dalit di India, jaringan solidaritas Dalit di negara-negara Eropa, dan para pembela Dalit lainnya yang memiliki tujuan bersama untuk mendorong hak asasi manusia orang-orang Dalit pada tingkat internasional.⁹⁶ Kesekretariatan IDSN berada di Copenhagen Denmark dan resmi terdaftar sebagai organisasi internasional non-pemerintahan pada Oktober 2003. Dalam tulisan Teuku May Rudy terkait kriteria INGO (*Intenational Non-Governmental*

⁹⁶ IDSN, "About Us." (24/2/2024, 15:00 WIB)

Organization), IDSN memiliki keanggotaan organisasi internasional non-pemerintahan, kerja sama internasional, dan ruang lingkup secara internasional.⁹⁷ Selain itu, IDSN juga merupakan bagian dari *global civil society* sebagai ruang sosial yang melampaui batas teritorial IDSN memiliki jaringan internasional untuk mendorong solidaritas internasional dalam mengakhiri diskriminasi kasta, jaringan-jaringan internasional tersebut meliputi organisasi Dalit dari negara-negara yang terkena dampak diskriminasi kasta, jaringan solidaritas internasional, dan organisasi non-pemerintah lainnya. IDSN memiliki nilai-nilai antara lain mengenai hak asasi manusia dengan melakukan penerapan pendekatan atau strategi yang berbasis akan hak asasi manusia, solidaritas dengan bekerja secara kompak dan berkolaborasi dengan komunitas Dalit, mengenai inklusi yaitu membangun lingkungan yang terbuka bagi orang-orang Dalit dengan memastikan partisipasi dari perwakilan komunitas Dalit agar dapat terlibat dalam pekerjaan dan struktur IDSN, kolaborasi dengan mendasarkan bekerja sama secara luas, dan komitmen dalam memberikan masukan yang akurat dan relevan.

Visi dari IDSN adalah menciptakan dunia yang bebas dari diskriminasi kasta dengan segala kemungkinan, hak, dan impian tidak dibatasi oleh kasta atau keturunan tertentu dan misinya adalah untuk memberikan kontribusi pada tingkat global untuk melindungi hak asasi manusia dari mereka yang terdampak perlakuan tidak adil karena kasta dan mendorong tindakan untuk menghilangkan perlakuan tersebut.⁹⁸ IDSN melakukan perubahan dengan beberapa cara, pertama yaitu

⁹⁷ Sekarayu, "Peran International Dalit Solidarity Network Dalam Mengatasi Kasus Diskriminasi Kasta Dalit Di India Tahun 2013-2017.", Hal. 16

⁹⁸ International Dalit Solidarity Network, "IDSN Intro Leaflet," 2023, <https://idsn.org/wp-content/uploads/2023/03/IDSN-Intro-Leaflet.pdf>, Hal. 3

meningkatkan kesadaran global terhadap kondisi yang dialami oleh orang-orang Dalit melalui media-media IDSN sehingga akan menumbuhkan rasa solidaritas internasional untuk mendukung dalam mengakhiri perlakuan tidak adil yang dialami oleh Dalit. Langkah kedua adalah dengan memfasilitasi pendapat atau suara orang-orang Dalit agar didengar pada tingkat internasional melalui forum-forum diskusi. Ketiga adalah dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kaum Dalit kepada lembaga-lembaga, jaringan organisasi, para aktivis dan peneliti di bidangnya.

Sesuai dengan visi-misinya, *International Dalit Solidarity Network* bekerja pada tingkat global untuk menghapus adanya perlakuan tidak adil yang disebabkan karena kasta maupun perlakuan lainnya yang serupa berdasarkan pekerjaan dan keturunan. IDSN sebagai penghubung antara orang-orang Dalit dan para pembela hak asasi manusia Dalit dengan lembaga internasional untuk mengubah kebijakan maupun praktik jika ada yang mengarah pada diskriminasi kasta melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), organisasi internasional lainnya dan pada tingkat nasional menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi pembela Dalit di negara-negara yang terdampak adanya diskriminasi kasta.⁹⁹ Karena itu, secara global IDSN mengkoordinasi dan membuka peluang kepada para pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, jurnalis, peneliti, maupun orang-orang yang memang memiliki tujuan untuk mendukung kaum Dalit

⁹⁹ International Dalit Solidarity Network, "What We Do," n.d., <https://idsn.org/about-us/what-we-do/>. (25/02/2024, 21:22 WIB)

untuk bergabung dalam memperjuangkan melawan tindakan tidak adil berdasarkan kasta atau keturunan.

Dalam bekerja sama dengan PBB, IDSN bekerja untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang Dalit melalui kerangka hak asasi manusia PBB yaitu dengan mengajukan isu-isu yang dialami oleh Dalit dan mendorong untuk negara-negara yang terlibat agar turut serta dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak kaum Dalit, dan kelompok lainnya yang juga terkena dampak dari perlakuan karena kasta dalam forum tersebut. Sebagaimana yang telah didokumentasikan oleh IDSN mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dialami oleh Dalit juga memberikan pengaruh pada Badan-badan hak asasi manusia PBB dalam membahas isu mengenai diskriminasi kasta dengan beberapa tinjauan terhadap negara-negara yang terkena dampak dari adanya sistem kasta serta hasil studi PBB yang relevan. IDSN memfasilitasi penyampaian informasi alternatif dan mendukung pernyataan bersama dari organisasi non-pemerintah lainnya kepada beberapa badan hak asasi manusia PBB yang meliputi UN *Human Rights Council*, *Universal Periodic Review (UPR)*, *UN Treaty Bodies*, *UN Special Procedures*, *UN Special Rapporteurs*, dan *Durban Review* terkait permasalahan atau kondisi yang dialami oleh orang-orang Dalit di negara-negara yang terdapat adanya diskriminasi kasta.¹⁰⁰ Hasil dari laporan tersebut akan dipantau dan didokumentasikan oleh IDSN menjadi sebuah data yang tersusun secara menyeluruh terkait bagaimana

¹⁰⁰ International Dalit Solidarity Network, "Compilation of UN References to Caste Discrimination," n.d., <https://idsn.org/un-2/compilation-of-un-references-to-caste-discrimination/>. (25/02/2024, 22:08 WIB)

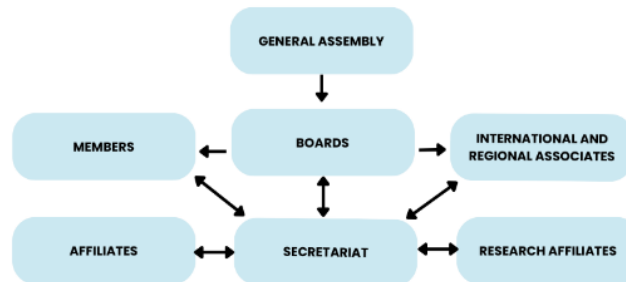
diskriminasi kasta atau tindakan yang serupa telah ditangani oleh badan-badan PBB.

Kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga Dewan, Komisi, dan Parlemen Uni Eropa, IDSN mendorong UE dan negara-negara anggota untuk memastikan baik kebijakan maupun hubungan dengan negara-negara yang terkena dampak dari kasta dapat berkontribusi dalam mengurangi adanya perlakuan tidak setara berdasarkan kasta. Adanya rencana Uni Eropa terkait hak asasi dan demokrasi, *The EU Strategic Framework on Human Rights and Democracy* menjadi peluang bagi IDSN untuk menyerukan isu-isu Dalit hal ini dimaksudkan agar dapat mempengaruhi kebijakan atau program UE beserta negara anggotanya untuk bertindak secara efektif dalam menghapus diskriminasi berbasis kasta baik dalam konteks bekerja sama dengan badan hak asasi PBB atau negara-negara yang terkena dampak kasta.¹⁰¹ Upaya IDSN untuk mempengaruhi agar UE mendorong atau memasukkan isu-isu Dalit ke dalam kebijakan dan dialog mengenai hak asasi manusia secara terstruktur dan transparan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh UE relevan memberikan pertimbangan khusus terkait masalah-masalah yang dialami oleh Dalit. Ketika isu yang diangkat oleh IDSN menjadi bagian dari kebijakan UE terkait hak asasi manusia, maka hal ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun program pembangunan dan bantuan kemanusiaan serta dalam hubungan perdagangan maupun kerja sama bisnis.

¹⁰¹ International Dalit Solidarity Network, "European Union," International Dalit Solidarity Network, n.d., <https://idsn.org/main-nav-eu/>, (25/02/2024, 22:20 WIB)

2.2.2 Struktur dan Jaringan IDSN

Grafik 2.6 Struktur IDSN



Sumber: IDSN, 2014

Sebagai bagian dari *global civil society*, IDSN juga memiliki struktur dalam mengatur pekerjaannya antara lain, Majelis Umum atau *General Assembly* merupakan struktur tertinggi dalam IDSN yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota dan asosiasi untuk menentukan para anggota Dewan dan menyetujui atau menolak strategi organisasi yang direkomendasikan oleh Dewan. Setiap anggota dan asosiasi memiliki satu suara dalam Majelis Umum. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.¹⁰² Kemudian di bawahnya adalah Dewan atau *The Board* yang terpilih akan menjabat selama tiga tahun dan beranggotakan 7-10 anggota dengan ketentuan yang pertama para anggota paling tidak berasal dari tiga negara yang terdampak sistem kasta, minimal ada tiga anggota perempuan Dalit, dan dua anggota dari *Dalit Solidarity Network* di luar Asia Selatan. Sebelum anggota Dewan selanjutnya dipilih dalam Majelis Umum, Dewan di periode sebelumnya memiliki wewenang untuk

¹⁰² International Dalit Solidarity Network, "IDSN Organisational Model and Statutes," 2014, <https://idsn.org/wp-content/uploads/2014/11/IDSN-statutes.pdf>, Hal. 4

memutuskan jumlah anggotanya dan bertanggung jawab atas keseluruhan rencana IDSN dan urusan keuangan.

Struktur selanjutnya adalah badan eksekutif IDSN yaitu berisikan Sekretariat Internasional yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan bertanggung jawab untuk melapor kepada para Dewan. Direktur Eksekutif IDSN yang menjabat hingga saat ini adalah Meena Varma seorang aktivis hak asasi untuk Dalit yang sebelumnya ia adalah ketua Dewan IDSN, kemudian menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari tahun 2017. Selain itu, sekretariat juga bertugas mengkoordinasikan pekerjaan IDSN berdasarkan arahan Dewan. Selain bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, di dalam IDSN juga terdapat tiga jaringan yaitu anggota, asosiasi, dan afiliasi.¹⁰³ Para anggota IDSN terdiri dari organisasi-organisasi di negara-negara yang terdampak diskriminasi kasta. Organisasi-organisasi yang ingin menjadi anggota IDSN harus mengajukan secara tertulis kepada Dewan IDSN untuk ditinjau kembali dan IDSN menerima hingga lima anggota baru setiap tahunnya, serta terdiri dari jaringan solidaritas Dalit (DSNs) di Eropa, anggota IDSN antara lain,

Tabel 2.1 Anggota IDSN

India	<p>a. . <i>All India Dalit Mahila Adhikar March (AIDMAM)</i> atau <i>The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR)</i></p> <p>b. <i>National Federation of Dalit Women</i></p> <p>c. <i>People's Watch</i></p> <p>d. <i>The Blue Club</i></p>
-------	---

¹⁰³*Ibid.*, Hal. 7

	<p>e. <i>The Rights Education and Development (READ)</i></p> <p>f. <i>Social Awareness Society for Youths (SASY)</i></p> <p>g. <i>Navsarjan Trust</i></p>
Nepal	<p>a. <i>Dalit NGO Federation (DNF)</i></p> <p>b. <i>The Feminist Dalit Organisation (FEDO)</i></p> <p>c. <i>Nepal Dalit National Social Welfare Organisation (NNDSWO)</i></p> <p>d. <i>Jagaran Media Center (JMC)</i></p> <p>e. <i>Dalit Alliance for Natural Resources (DANAR)</i></p>
Bangladesh	<p>a. <i>Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM)</i></p> <p>b. <i>DALIT (Khulna)</i></p>
Pakistan	<p>a. <i>Pakistan Dalit Solidarity Network</i></p> <p>b. <i>Center for Law and Justice</i></p>
Sri Lanka	<i>Human Development Organisation (HDO)</i>
DSN Eropa	<p>a. <i>Dalit Solidarity Network – UK di Inggris</i></p> <p>b. <i>Dalit Solidarity Network – Norway di Norwegia.</i></p> <p>c. <i>Dalit Solidarity Network – Finland di Finlandia</i></p> <p>d. <i>Dalit Solidarity Network – Germany di Jerman</i></p>

Kemudian terdapat asosiasi IDSN yang terdiri dari organisasi internasional maupun regional yang berfokus pada pembangunan hak asasi manusia termasuk mendukung penghapusan diskriminasi kasta atau sejalan dengan maksud dan tujuan IDSN. Organisasi-organisasi yang hendak menjadi asosiasi IDSN harus mengirimkan ajuan ke Dewan untuk ditinjau. Beberapa asosiasi IDSN antara lain,

1. *Arisa – Advocating Rights in South Asia*
2. *Anti-Slavery International*
3. *Asian Centre for Human Rights*
4. *Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)*
5. *Asian Human Rights Commission*
6. *Commonwealth Human Rights Initiative*
7. *Franciscans International*
8. *Human Rights Watch*
9. *ICIMA/Pax Romana*
10. *International Movement Against all forms of Discrimination (IMADR)*
11. *Minority Rights Group International*
12. *Robert Kennedy Memorial Foundation*
13. *World Council of Churches*

Semua para anggota dan asosiasi harus berusaha untuk memajukan kepentingan IDSN serta harus menghindari adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan, mencemari atau mengganggu maksud dan tujuan IDSN serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang atau kewajiban yang ditanggung oleh IDSN.¹⁰⁴ Selain itu, terdapat afiliasi yang terdiri dari organisasi-organisasi yang aktif terlibat secara langsung di negara-negara terdampak kasta dan keahlian mereka dapat digunakan ketika harus melakukan intervensi atau aksi tertentu secara internasional. Para afiliasi juga harus membutuhkan rekomendasi dari anggota

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hal. 7

IDSN jika hendak bergabung dan para afiliasi IDSN berhak mendapatkan berita bulanan terbaru IDSN. Afiliasi dalam IDSN terbagi menjadi dua kategori,

1. Afiliasi yang terdiri dari organisasi-organisasi yang secara aktif terlibat langsung di negara yang terkena dampak kasta atau organisasi yang dipimpin oleh orang Dalit dan mengikuti nilai serta prinsip IDSN terutama yang memang dikhususkan untuk berafiliasi beberapa diantaranya adalah

- a. *National Dalit Christian Watch (NDCW) - India*
- b. *Association for Dalit Women's Advancement of Nepal- Nepal*
- c. *Parittran - Bangladesh*

2. Afiliasi penelitian (*Research affiliation*) dapat terdiri dari individu maupun institusi penelitian yang berfokus pada diskriminasi kasta, diantaranya

- a. *Research Associates New York University School of Law's Center for Human Rights and Global Justice*
- b. *International Centre for Ethnic Studies – Sri Lanka*

Ada pun laporan keuangan IDSN dikeluarkan setiap tahunnya dalam Laporan Tahunan IDSN. Direktur Eksekutif menyerahkan laporan keuangan IDSN per tiga bulan kepada Dewan dan laporan keuangan satu tahun IDSN harus ditinjau dan disetujui oleh Dewan.¹⁰⁵ Pendapatan dari IDSN biasanya di dapat dari pendanaan oleh organisasi yang memfokuskan untuk memberikan dukungan dana seperti *Norwegian Human Rights Fund (NHRF)*, *Brot Fur Die Walt*, *Laudes Foundation*, dan pendapatan lainnya bisa dari donasi oleh masyarakat publik

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hal. 10

melalui situs resmi IDSN. Pendapatan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan IDSN bukan asosiasi pemberi hibah.

Tujuan perubahan IDSN menyeluruh mendorong tindakan dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat global melalui aksi lobi yang konsisten, berbagi informasi dan turut terlibat dengan para pemangku kebijakan agar menjadikan perlakuan tidak setara berbasis kasta yang dialami oleh orang-orang Dalit menjadi isu global.¹⁰⁶ Keterlibatan IDSN menjadi wadah internasional dan mendorong rasa solidaritas untuk kaum Dalit dalam memperjuangkan hak-hak mereka pada tingkat nasional dan global. Karena itu, IDSN memiliki keinginan jangka panjang dengan strategi per lima tahun yang selaras dengan beberapa poin-poin *Sustainable Development Goals* PBB. Strategi IDSN tahun 2019-2023 memiliki tiga tujuan strategis jangka panjang. Pertama mengenai perempuan dan anak-anak Dalit bebas dari tindakan tidak adil berbasis kasta dan gender. Target pada tujuan pertama ini adalah perjuangan untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak Dalit serta penegakkan keadilan yang telah mendapat perhatian internasional termasuk telah diangkat di forum PBB dan UE melalui upaya peningkatan kesadaran global.

Tujuan kedua adalah menghapus eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi lahan tanah, sumber daya dan kerja paksa yang berkaitan dengan kasta agar diperhatikan dalam laporan global mengenai bisnis, hak asasi, atau perbudakan dan secara terus terang telah dibahas di PBB dan UE. Ketiga adalah tujuan menghilangkan ketidaksetaraan yang dialami Dalit agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam

¹⁰⁶ International Dalit Solidarity Network, "Strategy 2019-2023," 2023, Hal. 6

proses pengambilan keputusan, target IDSN untuk memastikan terlibatnya suara Dalit dalam kampanye dan inisiatif global yang lebih luas dan mendorong keterlibatan aktif orang-orang Dalit dalam proses pengambilan kebijakan serta keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.¹⁰⁷ IDSN mengupayakan agar perwakilan-perwakilan dari komunitas Dalit terutama para perempuannya ikut serta dalam semua usaha IDSN di forum-forum internasional.



¹⁰⁷ International Dalit Solidarity Network, "Strategy 2019-2023," 2023, Hal. 7